

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT KAJIAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KABUPATEN ACEH TAMIANG)

Muhammad Rinaldi¹, Zuhri M. Nawawi², Sri Ramadhani³

Uin Sumatera Utara Medan

Email:¹muhammadrinaldi708gmail.com, ²zuhri.m.nawawi@uinsu.ac.id,

³sriramadhani@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kab. Aceh Tamiang dan untuk mengetahui Bagaimana hasil Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan menurut kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kab. Aceh Tamiang terbagi atas kesehatan dan pendidikan Diantaranya ibu hamil, anak usia dini (Balita), anak sekolah SD, SMP, SMA, disabilitas berat dan lanjut usia. Kemudian Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang) Mereka juga berharap agar PKH terus dilanjutkan karena sangat membantu masyarakat dalam menanggulangi keluarga miskin baik dalam kesehatan maupun pendidikan.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan, dan Penerima PKH Kabupaten Aceh Tamiang

Abstract

This study aims to determine the forms of the Family Hope Program (PKH) in poverty alleviation in Kab. Aceh Tamiang and to find out how the results of the Analysis of the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in poverty alleviation according to the study of Islamic Economics (Case Study of Aceh Tamiang District. This type of research is qualitative. The results of this study indicate that the research can be concluded that the forms of Family Programs Hope (PKH) in poverty alleviation in Aceh Tamiang Regency is divided into health and education including pregnant women, early childhood (toddlers), elementary, middle, high school students, severe disabilities and the elderly. Then Analysis of the Family Hope Program (PKH) in Poverty Alleviation According to the Study of Islamic Economics (Case Study of Aceh Tamiang District) They also hope that PKH will continue because it really helps the community in dealing with poor families both in health and education.

Keywords: Family Hope Program (PKH), Poverty, and PKH Recipients of Aceh Tamiang District Kabupaten

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar pada tahun 2007 yaitu 231,6 juta jiwa dan di anugerahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi sungguh sesuatu yang ironis menurut data badan pusat statistik (BPS) tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebesar 37,17 juta jiwa atau 16,58% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan laporan dari Bank Dunia (*World Bank*) adalah hampir setengahnya dari penduduk di Indonesia hidup miskin atau rentan terhadap kemiskinan. Dengan kondisi hampir 42% rumah tangga hidup di antara garis kemiskinan US\$1 hingga US\$2 per-hari, terlalu banyak rakyat Indonesia yang sangat rentan jatuh miskin.¹ Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. Masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia.² Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda.

Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat.³ Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum; kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.⁴ Kompleksitas kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pengertian dan dimensi saja namun berkaitan juga dengan metode yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan. Tulisan ini mencoba memaparkan tentang kemiskinan berdasarkan konsep, model pengukuran dan alternatif model dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Di Indonesia ini ada beberapa program yang dapat menanggulangi kemiskinan salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), dan bagi anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas

¹Nunung Nurwati, "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan," *Jurnal Kependudukan Padjadjaran* 10, no. 1 (2008).

²Deysy Lendentariang, Daisy S. M. Engka, and Krest D. Tolosang, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19, no. 02 (2019).

³Putri Anita Rahman, Firman, and Rusdinal, "Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi," *Jurnal Pendidikan Tambusai (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai)* 3 (2019).

⁴Choiriyah Choiriyah, "Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.42>.

layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.⁵ Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.⁶

Berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan program ini sangat jelas dan detail. Proses persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi proses persiapan pelaksanaan mulai dari pemilihan kabupaten atau kota oleh BPS (Badan Pusat Statistik), penentuan lokasi penerima PKH, pemilihan pendamping, dan menentukan peserta PKH. Selain itu, dalam proses pengumpulan data dan informasi harus ada kerjasama antar satuan kerja terkait. Dengan adanya kerjasama maka tujuan program akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.⁷ Dalam Islam juga dijelaskan dalam bentuk program pemberian bantuan sosial yang dinamakan dengan *Ziswaf*.

Zakat, Infaq, *shadaqah* dan *waqaf* (ZISWAF) merupakan sebagai wujud kepedulian kepada kaum *dhuafa'* yang diharapkan dapat memberdayakan ekonomi lemah dan meningkatkan kesejahteraan ummat.⁸ Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan *Waqaf* (ZISWAF) yang terhimpun yang akan disalurkan kepada para *dhuafa'* dan 8 Ashnaf dalam bentuk program seperti, program beasiswa *dhuafa'*, Dakwah islam, bantuan lansia, Ramadhan berbagi, Waqaf tanah, Pemberdayaan ekonomi, Hibah sarana kerja, Aksi Tanggap Bencana, Tebar Hewan kurban dan Waqaf uang. Dengan tujuan mengelola dana sosial tersebut menjadi sesuatu yang berguna bagi sesama untuk anak yatim piatu, kaum *dhuafa'*, fakir dan miskin yang ingin mengembangkan usahanya tetapi terkendala dengan kondisi perekonomiannya.⁹

Pelaksanaan Program Ziswaf ini diantaranya Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf. Sedangkan zakat adalah penghasilan untuk kepentingan sosial yang dianjurkan oleh ajaran Islam.¹⁰ Disini terdapat perbedaan dengan zakat, dimana zakat harus jelas nishab dan haulnya sedangkan dalam infaq tidak perlu adanya nishab dan haul. Infaq adalah memberikan harta sebagai suatu amal ibadah kepada Allah SWT. Dan amal sosial masyarakat serta kemanusiaan dalam menyerahkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan. Shadaqah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Wakaf adalah menahan suatu untuk mendapatkan manfaat dari suatu tersebut. secara istilah wakaf adalah menahan harta dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah SWT. Islam memandang

⁵Ayu Andira, Burhanudin, and Rita Kalalinggi, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Samarinda," *Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*Journal Ilmu Pemerintahan , 6, no. 4 (2018).

⁶Nuraida Nuraida, "Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang," *The World of Public Administration Journal*, 2020, <https://doi.org/10.37950/paj.vi.741>.

⁷Intan Putri Pertiwi, FX Fedinandus, and Arthur Daniel Limantara, "Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting," *CAHAYATECH* 8, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.47047/ct.v8i2.46>.

⁸Ahmad Syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 2 (2018).

⁹Andri Andri, "Sentralisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.21>.

¹⁰M. Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>.

kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha.¹¹ Islam sangat memperhatikan ekonomi yang merupakan pondasi kehidupan dalam keluarga dan Islam mengarahkan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan pada seluruh ciptaan-Nya. Untuk terlepas dari perangkap kemiskinan, sesungguhnya Allah SWT menganjurkan umatnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya sehingga ia mampu mencapai kesejahteraan.¹²

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan, presiden RI telah mengeluarkan Perpes No. 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden RI, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (*cluster*), sedangkan untuk penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) terlaksana di KAB. Aceh Tamiang di mulai pada tahun 2013 dan terlaksana sampai saat ini. Berikut data jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari tahun 2015-2019 di Kabupaten Aceh Tamiang.

Tabel 1
Jumlah Penerima PKH (Keluarga)

No.	Tahun	Jumlah Penerima PKH
1.	2015	3357
2.	2016	7388
3.	2017	7286
4.	2018	16466
5.	2019	15542

Sumber : Kantor Dinas Sosial Kab.Aceh Tamiang 2020

Dari tabel 1.1 di atas pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan penerima PKH, yang mana terjadi di tahun 2015 berposisi di angka 3.357 sedangkan di tahun 2018 terjadi peningkatan yang sangat drastis pada penerimaan PKH yaitu di angka 16.466 dengan selisih 13.109 dari tahun 2015, dan pada tahun 2019 terjadi sedikit penurunan akan tetapi tidak dikatakan menurun pada penerimaan PKH yaitu 15.542 dengan selisih 924 dari tahun 2018.

Berikut data kemiskinan Kab. Aceh tamiang dari tahun 2015-2019

Tabel 2
Persentase Penduduk Miskin

Tahun	Persentase Penduduk Miskin
2015	14,57
2016	14,51
2017	14,69

¹¹Ermiaati and M. Wahyuddin Abdullah, "KAJIAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DITINJAU DARI SHARIAH ENTERPRISE THEORY (WAHDAH INSPIRASI ZAKAT/WIZ KOTA MAKASSAR)," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.483>.

¹²Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Bekerja Di Bank Konvensional: Suatu Pendekatan Maqashid Syariah," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7640>.

2018	14,21
2019	13,38

Sumber: acehtamiangkab.bps.go.id

Dari tabel diatas 1.1 pada tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan penerima PKH sedangkan pada tabel 1.2 persentase penduduk miskin mengalami penurunan kemiskinan pada tahun 2019 yaitu di angka persentase 13,38 persen. Yang mana persentase tertinggi penduduk miskin terjadi pada tahun 2017 yaitu 14,69 persen dengan selisih 1,31 persen.

B.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian ini objeknya mengenai bentuk-bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan pada kelompok masyarakat.¹³ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti analisis imlementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan menurut kajian ekonomi Islam.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah dari Program Keluarga Harapan (PKH), namun popolasidalam penelitian ini adalah 50 orang di Kab. Aceh Tamiang.

Pengumpulan data berupa wawancara secara mendalam (*Indepth Interview*) dan didukung oleh studi kepustakaan, metode analisis data digunakan oleh deskriptif kualitatif.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan data penerima PKH, dokumen foto, rekaman, dan observasi mendalam oleh peneliti. penelitian ini adalah kata kata atau tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang ingin diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data.¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder diantaranya buku-buku, literatur, internet, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen dokumen resmi lembaga terkait dengan penelitian ini.¹⁵

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), dan bagi anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.¹⁶ Manfaat PKH juga

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin (Bairut: Rosda Karya, 2010), <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004, 2004).

¹⁵Hadi.

¹⁶Fitri Aningsih Elia and Yahya Nusa, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika," *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)* 5, no. 1 (2021).

mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.¹⁷

Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan *millennium*. Ada lima komponen MGDs (*Millennium Development Goals*) yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun, anak pra sekolah RTM atau peserta PKH.¹⁸

Jadi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH dengan tujuan jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum program keluarga harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM.¹⁹

Tujuan PKH meliputi 5 hal yaitu :

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupsandang, pangan, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya

¹⁷Wenny Desty Febrian Zulhaida Abdiana Ilo, "EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI NAGARI TANJUANG BUNGO KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA," *Jurnal Manajemen Kompeten* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.51877/mnjm.v2i2.120>.

¹⁸Faturachman Alputra Sudirman et al., "Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," *Neo Societal* 5, no. 4 (2020).

¹⁹E Gunawan, "Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia ...*, 2021.

kemampuan untuk memenuhstandar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.²⁰

Kemiskinan juga dapat didefinisikan dengan kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, atau ketidaksanggupan seseorang untuk memuaskan kebutuhan dan keperluan materinya, atau kondisi individu yang mengalami kekurangan relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.²¹ Menurut Soerjono Soekanto, miskin merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup untuk memeliharanya dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisik dalam kelompoknya tersebut. Sementara itu, Parsudi Suparlan menjelaskan bahwa masyarakat miskin adalah sekelompok manusia yang kehidupan serta pendapatan sehari-harinya tidak dapat memenuhi kebutuhan yang paling pokok sehingga kehidupan mereka serba kekurangan.²²

b. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidakdapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional.²³ Berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan memiliki 3 bentuk yakni sebagai berikut:²⁴

1) Kemiskinan absolute

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2) Kemiskinan relative

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belummenjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanyaketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

3) Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern

²⁰Rahman, Firman, and Rusdinal, "Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi."

²¹Ishatono Ishatono and Santoso Tri Raharjo, "SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENGENTASAN KEMISKINAN," *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>.

²²Rahman, Firman, and Rusdinal, "Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi."

²³Imam Yuliadi and Sumitro Sumitro, "Efektifitas BLT Covid-19 Di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa (Studi Konstruksi Sosial Kemiskinan)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i3.5980>.

²⁴Wa Ode Ela Olanda, Bahtiar, and Ambo Upe, "STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT NELAYAN DALAM MENGHADAPI KEMISKINAN DI DESA MEKAR SAMA KECAMATAN NAPABALANO KABUPATEN MUNA," *Neo Societal* 4, no. 1 (2019).

c. Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam

Strategi pengentasan kemiskinan dalam Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja yaitu:²⁵

- 1) Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua jalur utama; pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Pada saat yang sama Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis.
- 2) Islam mendorong penciptaan anggaran Negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting* yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran Negara sepenuhnya untuk kepentingan publik.
- 3) Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang member manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.
- 4) Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan.
- 5) Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (*pro-poor income distribution*). Terdapat tiga instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak dan wakaf. Jika dilihat dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa Islam sangat memperhatikan berbagai hal yang dapat mempengaruhi kehidupan untuk dapat hidup layak dan terhindar dari kemiskinan, perhatian tersebut dapat terlihat baik secara individu, kelompok/masyarakat maupun di bidang pemerintahan. Dalam Islam pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang dipimpin sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ □

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-

²⁵Sri Budi Cantika, "STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Journal of Innovation in Business and Economics* 4, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.101-114>.

rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa (QS Al-Hadid:25).²⁶

- 6) Indikator Kemiskinan Mengukur tingkat kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan atas normanorma tertentu yang terdapat disuatu daerah. Pemilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri atas dua unsure, yaitu: *pertama*, pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya. Kedua, jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut.²⁷ Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya. Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin.²⁸ Dengan kata lain, sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Adapun kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Aceh Tamiang

a. Sejarah PKH di Kab. Aceh Tamiang

Berdasarkan kemiskinan di kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini membuktikan bahwa bentuk program pemerintah belum berjalan sesuai maksimal termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), oleh sebab itu keefektifan suatu program penanggulangan kemiskinan harus benar-benar dilakukan penelitian. PKH di kabupaten Aceh Tamiang sudah berlangsung sejak tahun 2013, dimana penyaluran bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2010.

²⁷Meri Enita Puspita Sari and Diah Ayu Pratiwi, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT SUKU LAUT PULAU BERTAM KOTA BATAM,” *JURNAL TRIAS POLITIKA* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1464>.

²⁸Samud Samud, “Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam,” *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2018): 215, <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3565>.

Berikut ini adalah data penerimaan PKH di kabupaten Aceh Tamiang

Tabel 4

Penerimaan PKH di Kabupaten Aceh Tamiang per Kecamatan

No	Nama Desa	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Banda Mulia	172	174	230	798	784
2	Bandar Pusaka	156	155	518	1064	1042
3	Bendahara	187	187	585	1259	1226
4	Karang Baru	528	524	1016	2687	2419
5	Kejuruan Muda	333	331	742	1564	1473
6	Kota Kuala Simpang	137	137	265	861	819
7	Manyak Payed	629	625	1394	2509	2400
8	Rantau	265	266	622	1541	1469
9	Sekerak	113	110	250	454	422
10	Seruway	446	440	920	1842	1691
11	Tamiang Hulu	94	92	217	905	861
12	Tenggulun	297	289	527	991	936
Jumlah		3357	3330	7286	16466	15542

Sumber data dinas sosial Kab. Aceh Tamiang 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penerimaan PKH di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2015-2019 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah penerimaan PKH, oleh karena itu maka keefektifan program PKH di Kabupaten Aceh Tamiang perlu dilakukan penelitian, apakah dengan adanya penyaluran PKH di Kabupaten Aceh Tamiang dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi selama ini

b. Implementasi PKH di Kab. Aceh Tamiang

Program Keluarga Harapan yang ada Kab. Aceh Tamiang sudah berlangsung terhitung sejak tahun 2013, fakta yang ditemukan di lapangan adalah implementasi PKH tersebut masih belum sesuai dengan kriteria penetapan RTM penerima bantuan seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan peserta PKH yang di kategorikan sebagai keluarga sejahtera namun tercantum sebagai penerima bantuan tersebut. Bahkan banyak peserta penerima bantuan yang telah terdaftar selama lebih dari lima tahun.

Definisi implementasi sering berubah-ubah dengan banyaknya perkembangan implementasi itu sendiri, menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

1. Karakteristik Informan

Pada bagian ini karakteristik informan yang akan dibahas yaitu mulai dari usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai pokok masalah yang ingin penulis teliti. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kab. Aceh Tamiang dengan jumlah informan sebanyak 50 orang.

a. Usia Informan / Narasumber

Adapun usia narasumber dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Data Informan Berdasarkan Usia

No.	Usia Informan	Jumlah	Persentase
1	21-35 Tahun	12	24%
2	36-46 Tahun	27	54%
3	>47	11	22%
Total		50	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah informan yang berusia 21-35 tahun sebanyak 12 orang atau 24%, kemudian informan yang berusia 36-46 tahun sebanyak 27 orang atau 54 %, sedangkan sebanyak 11 orang atau 22% merupakan narasumber yang berusia >47 tahun.

b. Berdasarkan Pekerjaan Informan

Pekerjaan informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Data Informan Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah Informan	Persentase
1	Ibu Rumah Tangga	38	76%
2	Petani	-	-
3	Buruh	4	8%
4	Pedagang	8	16%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 38 orang atau 76% informan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebanyak 4 orang 8% bekerja sebagai buruh, dan 8 orang atau 16% menjadi pedagang.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Informan

Tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada pada tabel di bawah ini:

Tabel 7
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Informan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	6	12%
2	SMP	12	24%

3	SMA	32	64%
Total		50%	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa informan dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 6 orang atau 12%, selain itu informan dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 12 orang atau 24%, dan informan dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 32 orang atau 64%.

d. Karakteristik Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data tentang jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase%
Laki-laki	6	12%
Perempuan	44	88%
Jumlah	50	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 6 orang (12%) dan responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 44 orang (88%). Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan terbanyak dengan jumlah 44 orang (88%).

B. Pembahasan

1. Bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Kab. Aceh Tamiang

Skenario bantuan yang diterapkan selama ini belum mencerminkan adanya keadilan. Sehingga bantuan yang dikucurkan sering menimbulkan kesenjangan antar peserta PKH dengan komposisi anggota rumah tangga dan beban pendidikan yang berbeda-beda. Peserta PKH yang mempunyai anak balita lebih dari satu dan yang mempunyai anak yang masih sekolah dibangku SD, SMP, SMA masih merasakan bahwa jumlah bantuan keuangan PKH belum mencukupi sehingga belum maksimal atau belum mencukupi sehingga tidak bisa membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya secara signifikan.

Penduduk miskin hidup tanpa adanya kebebasan pokok dan pilihan yang lebih baik. Mereka sering kali tidak cukup dalam hal makanan dan pemukiman, pendidikan dan kesehatan, perbedaan dalam rasa aman seperti layaknya orang hidup. Mereka juga rentan terhadap penyakit, dan ekonomi yang buruk. Masyarakat miskin seringkali mendapatkan perlakuan buruk oleh Negara dan kurangnya kekuatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada empat bentuk kemiskinan, diantaranya adalah:

a. Kemiskinan Pendapatan

Kemiskinan pendapatan adalah seseorang dikatakan miskin jika dan hanya pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sebagai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan khususnya makan.

b. Kemiskinan Manusia

Kemiskinan manusia diartikan dengan menggambarkan melalui tiga perspektif kemiskinan-pendapatan, kebutuhan dasar dan kapabilitas dan

merumuskannya dalam satu indeks kemiskinan manusia, yakni: tingkat umur, pengetahuan, dan standar hidup layak.

- c. Kemiskinan Kebutuhan Dasar
Kemiskinan kebutuhan dasar yaitu kemiskinan yang merupakan ketiadaan kebutuhan material untuk mencukupi kebutuhan minimal hidup termasuk makan.
- d. Kemiskinan Kemampuan yaitu kemiskinan kapabilitas yang merupakan tidak adanya kemampuan dasar untuk berfungsi sebagai manusia karena tidak adanya kesempatan untuk mencapainya.

Pemberdayaan masyarakat miskin dengan pendekatan modal manusia merupakan alternatif efektif. Hal ini karena mengedepankan pembangunan kapasitas manusia dan diimbangi dengan pengembangan dimensi-dimensi pemberdayaan yang terkait dengan kemiskinan. Sementara yang dilakukan oleh pemerintah umumnya menggunakan pendekatan ekonomi.

2. Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Dalam Kajian Ekonomi Islam di Kab. Aceh Tamiang

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islampun memandangnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Untuk mengatasi kemiskinan digunakan dan diterapkan sistem ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Berusaha dan bekerja
- 2) Larangan menumpuk harta
- 3) Zakat
- 4) Hukum waris
- 5) Ghanimah

Namun seiring berkembangnya zaman tentu dari keenam poin yang masih relevan untuk diterapkan hanya 5 poin karena saat ini konsep ghanimah sudah tidak ada lagi. Kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia di mana mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan sebuah ironi, apalagi negara ini merupakan sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bertambah hingga sekarang sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Ketidaksiaran terhadap penanganan nasib dan masa depan puluhan juta penduduk miskin di tanah air ini merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.²⁹

Prinsip ajaran Islam adalah membebaskan manusia dari kemiskinan menuju kehidupan yang layak dan berkecukupan. Alqur'andan Hadis menekankan agar setiap manusia bekerja secara produktif, mengolah kekayaan sumber alam agar menjadi sumber ekonomi sebagai penunjang kebutuhan hidupnya. Dan Allah tidak memberikan rezki kepada manusia dalam bentuk jadi tanpa perlu diusahakan dan siap digunakan, tetapi Allah telah menjadikan alam ini untuk digarap dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kemakmuran manusia.³⁰

²⁹Lendentariang, Engka, and Tolosang, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe."

³⁰Asrul Hamid, "Kerjasama (Syirkah) Penyedia Jasa Tiket Dengan Penyedia Jasa Transportasi Di Panyabungon Dalam Analisis Hukum Islam," *Jurnal Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 28–40, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/110/121>.

Dari kaidah-kaidah kepemilikan perspektif Islam, prinsip dasar ekonomi Islam dapat diformulasikan antara lain:³¹

- 1) **Kebebasan Individu.** Manusia diberi kebebasan untuk memutuskan suatu hal yang dianggap perlu selama tidak merugikan pihak lain.
- 2) **Larangan Menimbun Kekayaan.** Islam melarang keras adanya praktek ihtikar atau penimbunan kekayaan yang bertujuan supaya terjadi kelangkaan barang sehingga terjadi kenaikan harga hingga meraup keuntungan demi kepentingan pribadinya.
- 3) **Persamaan Tingkat Sosial.** Kesamaan tingkat sosial sangat didukung dalam ajaran Islam sehingga kekayaan tidak dinikmati sekelompok masyarakat tertentu dan pada yang bersamaan setiap manusia memiliki peluang yang sama untuk berusaha.
- 4) **Jaminan Sosial.** Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan Negara menjamin untuk mendapatkan kebutuhannya.
- 5) **Distribusi Kekayaan Secara Meluas.** Sistem ekonomi Islam melarang menumpuk kekayaan pada kelompok tertentu tetapi harus didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq).
- 6) **Perbedaan Dalam Batas Yang Wajar.** Islam mengakui ketidaksamaan ekonomi di antara manusia namun bukan berarti membiarkannya begitu saja melainkan berupaya agar ketidaksamaan tingkat ekonomi tetap dalam batas kewajaran.
- 7) **Kesejahteraan Bersama.** Ajaran Islam meletakkan dasar bahwa kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat berjalan bersama, seiring dan saling melengkapi, bukan saling bersaing dan bertentangan. Sistem ekonomi Islam berupaya meminimalisir kemungkinan timbulnya konflik dan mengatur agar terwujudnya saling memberi manfaat.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini dan membuat jumlah penduduk miskin bertambah banyak. menjadi suatu masalah yang harus dicari solusinya. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa penambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena masalah kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (over population), akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil. Dengan demikian, proses sosialisasi telah dilakukan dengan baik dan benar secara rutin oleh pihak Dinas Sosial mengenai tujuan dari PKH. Para pendamping PKH juga senantiasa menginformasikan kepada penerima tentang waktu pencairan bantuan PKH tersebut, dan rutin melakukan pertemuan dengan penerima PKH.

Pencairan dana PKH dilakukan dengan mengirimkan uang dari pihak Bank ke rekening masing-masing peserta PKH, sehingga peserta PKH dapat mengambil uangnya sendiri di ATM. Ketepatan waktu dalam pencairan dana bantuan PKH sangat penting, mengingat pencairan dana bantuan social harus sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Tepat waktu merupakan jangka waktu pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan program PKH proses pencairan dana bantuan harus dicairkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga dapat menentukan efektif atau tidaknya program tersebut. Ketepatan waktu dalam pencairan bantuan PKH sangat diperlukan, mengingat bantuan sosial yang diberikan setiap tiga bulan sekali kepada masing masing peserta PKH.

³¹Khairul Bahri Nasution, "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)," *Islamic Circle* 1, no. 2 (2020): 80–91.

Pencairan dana PKH dilakukan dengan mengirimkan uang dari pihak Bank ke rekening masing-masing peserta PKH, sehingga peserta PKH dapat mengambil uangnya sendiri di ATM. Ketepatan waktu dalam pencairan dana bantuan PKH sangat penting, mengingat pencairan dana bantuan sosial harus sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

E. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kab. Aceh Tamiang terbagi atas kesehatan dan pendidikan. Diantaranya ibu hamil, anak usia dini (Balita), anak sekolah SD, SMP, SMA, disabilitas berat dan lanjut usia. Dimana para penerima sudah merasa sedikit terbantu dengan adanya bantuan PKH yang mereka terima selama ini. Adapun dampak yang dirasakan penerima yaitu, Terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Meringankan biaya pendidikan, dan balita dengan demikian, program PKH dapat membantu penerima untuk meringankan biaya kehidupan sehari-hari. Sehingga bantuan yang dikucurkan sering menimbulkan kesenjangan antar peserta PKH dengan komposisi anggota rumah tangga dan beban pendidikan yang berbeda-beda.
2. Berdasarkan hasil analisis Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan menurut Kajian ekonomi Islam di Kab. Aceh Tamiang Menurut hasil penelitian yang peneliti temukan saat melakukan penelitian di lapangan tentang Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang) dilakukan Wawancara di Kab. Aceh Tamiang. sejak adanya Program Keluarga Harapan terbukti lebih mensejahterakan para peserta penerima PKH. Mereka juga berharap agar PKH terus dilanjutkan karena sangat membantu masyarakat dalam menanggulangi keluarga miskin baik dalam kesehatan maupun pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiana Ilo, Wenny Desty Febrian Zulhaida. "EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI NAGARI TANJUANG BUNGO KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA." *Jurnal Manajemen Kompeten* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.51877/mnjm.v2i2.120>.
- Andira, Ayu, Burhanudin, and Rita Kalalinggi. "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Samarinda." *Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat NasionaleJournal Ilmu Pemerintahan* , 6, no. 4 (2018).
- Andri, Andri. "Sentralisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.21>.
- Cantika, Sri Budi. "STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Journal of Innovation in Business and Economics* 4, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.101-114>.
- Choiriyah, Choiriyah. "Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.42>.
- Elia, Fitri Aningsih, and Yahya Nusa. "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika." *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)* 5, no. 1 (2021).
- Ermianti, and M. Wahyuddin Abdullah. "KAJIAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DITINJAU DARI SHARIAH ENTERPRISE THEORY (WAHDAH INSPIRASI ZAKAT/WIZ KOTA MAKASSAR)." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.483>.
- Gunawan, E. "Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia ...*, 2021.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004, 2004.
- Hamid, Asrul. "Kerjasama (Syirkah) Penyedia Jasa Tiket Dengan Penyedia Jasa Transportasi Di Panyabungan Dalam Analisis Hukum Islam." *Jurnal Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 28–40. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/110/121>.
- Hamid, Asrul, and Dedisyah Putra. "Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Bekerja Di Bank Konvensional: Suatu Pendekatan Maqashid Syariah." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7640>.
- Ishatono, Ishatono, and Santoso Tri Raharjo. "SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENGENTASAN KEMISKINAN." *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2010.
- Lendentariang, Deysy, Daisy S. M. Engka, and Krest D. Tolosang. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Dan Jumlah Penduduk

- Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19, no. 02 (2019).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*. Bairut: Rosda Karya, 2010. <https://scholar.google.com/citations?user=OB3eJYAAAAAJ&hl=en>.
- Makhrus, M. “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>.
- Nasution, Khairul Bahri. “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam).” *Islamic Circle* 1, no. 2 (2020): 80–91.
- Nuraida, Nuraida. “Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cislak Kabupaten Subang.” *The World of Public Administration Journal*, 2020. <https://doi.org/10.37950/paj.vi.741>.
- Nurwati, Nunung. “Kemiskinan: Model Pengukuran , Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan.” *Jurnal Kependudukan Padjadjaran* 10, no. 1 (2008).
- Olanda, Wa Ode Ela, Bahtiar, and Ambo Upe. “STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT NELAYAN DALAM MENGHADAPI KEMISKINAN DI DESA MEKAR SAMA KECAMATAN NAPABALANO KABUPATEN MUNA.” *Neo Societal* 4, no. 1 (2019).
- Pertiwi, Intan Putri, FX Fedinandus, and Arthur Daniel Limantara. “Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting.” *CAHAYATECH* 8, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.47047/ct.v8i2.46>.
- Rahman, Putri Anita, Firman, and Rusdinal. “Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi.” *Jurnal Pendidikan Tambusai (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai)* 3 (2019).
- Samud, Samud. “Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah* 10, no. 2 (2018): 215. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3565>.
- Sari, Meri Enita Puspita, and Diah Ayu Pratiwi. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT SUKU LAUT PULAU BERTAM KOTA BATAM.” *JURNAL TRIAS POLITIKA* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1464>.
- Sudirman, Faturachman Alputra, Muhammad Basri, Khoirul Huda, and Ambo Upe. “Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).” *Neo Societal* 5, no. 4 (2020).
- Syafiq, Ahmad. “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf.” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 2 (2018).
- Yuliadi, Imam, and Sumitro Sumitro. “Efektifitas BLT Covid-19 Di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa (Studi Konstruksi Sosial Kemiskinan).” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i3.5980>.